

Pancasila Sebagai Kunci Menjaga Keberagaman dalam Persatuan Indonesia

Anisa Fadila Rahmadifa^{a,1*}, Dwi Yuliana^{a,2}, Aini Sarah^{a,3}, Amelia Dewa Ananda^{a,4},
Sindy Sahrani^{a,5}, Wulandari^{a,6}

^a Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

¹ anisafadila2004@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 4 Januari 2025;

Revised: 20 Januari 2025;

Accepted: 27 Januari 2025.

Kata-kata kunci:

Pancasila;
Keberagaman;
Perspektif
Multikulturalisme;
Kesatuan.

Keywords:

Pancasila;
Diversity;
Multiculturalism
Perspective;
Unity.

ABSTRAK

Indonesia adalah negara dengan keberagaman yang sangat kaya, baik dari segi suku, agama, budaya, maupun bahasa. Keberagaman ini, meskipun menjadi salah satu kekayaan terbesar bangsa, juga menyimpan tantangan besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan sosial dan integrasi nasional. Pancasila tidak hanya sebagai simbol negara, melainkan juga sebagai pedoman hidup bersama yang menyatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam kerangka kebhinekaan. Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kesatuan dan keragaman di tengah masyarakat yang multikultural. Artikel ini membahas bagaimana Pancasila berfungsi sebagai kunci menjaga keberagaman dalam persatuan Indonesia. Dalam konteks multikulturalisme, Pancasila tidak hanya menjadi alat pemersatu tetapi juga sebagai pedoman dalam menyelesaikan konflik dan menciptakan harmoni sosial. Dengan menganalisis penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam berbagai kebijakan sosial dan pendidikan, serta studi kasus dari berbagai daerah di Indonesia, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan strategi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip multikulturalisme.

ABSTRACT

Pancasila as The Key To Maintaining Diversity in Indonesian Unity. Indonesia is a country with very rich diversity, both in terms of ethnicity, religion, culture, and language. This diversity, although being one of the nation's greatest riches, also poses great challenges in maintaining unity and integrity. In this context, Pancasila as the foundation of the state and the nation's ideology has a very important role in maintaining social harmony and national integration. Pancasila is not only a symbol of the state, but also a guideline for living together that unites all elements of Indonesian society within the framework of diversity. Pancasila as the basic ideology of the Indonesian state has an important role in maintaining unity and diversity in a multicultural society. This article discusses how Pancasila functions as a key to maintaining diversity in Indonesian unity. In the context of multiculturalism, Pancasila is not only a unifying tool but also a guideline in resolving conflicts and creating social harmony. By analyzing the application of Pancasila principles in various social and educational policies, as well as case studies from various regions in Indonesia, this article aims to identify challenges and strategies in integrating Pancasila values with the principles of multiculturalism.

Copyright © 2025 (Anisa Fadila Rahmadifa, dkk). All Right Reserved

How to Cite: Rahmadifa, A. F., Yuliana, D., Sarah, A., Ananda, A. D., Sahrani, S., & Wulandari, W. (2025). Pancasila Sebagai Kunci Menjaga Keberagaman dalam Persatuan Indonesia. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 5(1), 7–11. <https://doi.org/10.56393/antropocene.v5i1.2788>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia tidak dapat mengabaikan atau menghindari dari multikulturalisme bangsa ini; terdapat ribuan pulau, ratusan bahasa, suku, bangsa, dan agama di Indonesia (Toriyono, Sibilana, & Setyawan, 2022). Jika kita dapat mengelola integrasi ini dengan cara yang menciptakan keindahan dan kekuatan, kondisi ini dapat menjadi berkah dan keputusan yang bijaksana. Namun, jika multikulturalisme tidak diakomodasi secara efektif, hal itu juga dapat menjadi tragedi yang berujung pada kehancuran negara. Karena Republik Indonesia adalah negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan kaya, masuk akal jika tujuan pendiriannya Mengingat negara Indonesia didirikan oleh merasa bahwa kemajemukan bangsa ini hanya dapat memiliki makna yang baik melalui negara bangsa, demokrasi, keadilan sosial, dan kemanusiaan (HAM), yang kemudian dipadukan dengan pengetahuan tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti dalam petikan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 berikut: “Negara Indonesia bukanlah negara untuk satu orang, dan bukan pula negara untuk satu golongan, sekalipun golongan kaya.” Namun, kita telah mendirikan negara yang “setiap orang untuk dirinya sendiri, tidak ada yang tertinggal” (Shofa, 2016).

Pancasila pada hakekatnya adalah sistem nilai yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur dan Kebudayaan bangsa Indonesia, yang berasal dari unsur-unsur Kebudayaan secara keseluruhan, dan terpadu menjadi Kebudayaan bangsa Indonesia. Ada beberapa pendapat yang menyebutkan tentang asal usul Pancasila. Walaupun banyak perbedaan pendapat soal asal usul Pancasila, tetapi meskipun berbeda tetap mempunyai kedudukan yang sama. Asal mula Pancasila dibedakan menjadi 2, yaitu asal mula langsung dan juga tidak langsung. Asal mula langsung mencakup pembahasan-pembahasan dari menjelang dan sampai sesudah proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yang menunjukkan aspek langsung Pancasila sebagai dasar negara, sedangkan asal mula tidak langsung lebih menunjukkan sebelum pada aspek bahan dalam sejarah dimasa lampau, khususnya pada masa sebelum Kemerdekaan. (Luh Putu Swandewi Antari, 2020)

Pada kenyataannya, keragaman masyarakat dan budaya Indonesia bukanlah masalah baru. Franz Magnis-Suseno (2010) mengklaim bahwa sejak negara ini didirikan sebagai negara otonom, Ada keragaman dalam masyarakat dan budaya Indonesia sehingga partai-partai inferior dan minoritas diperlukan agar partai mayoritas, atau partai superior, dapat terus ada, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bila dipadukan dengan muatan politik atau ideologi atau kemungkinan yang tidak setara bagi kinerja ekonomi, dikotomi multikultural mayoritas-minoritas, superior-inferior dapat menjadi tragedi besar (Kusumohamidjojo, 2000). Oleh karena itu, pemahaman yang utuh tentang kesatuan dalam keberagaman diperlukan untuk pengembangan masyarakat Indonesia yang beragam. Konsep ini berpusat pada upaya menjaga persatuan Indonesia sambil mengakui kekayaan bentang sosial dan budayanya yang beragam.

Kenyataannya, keberagaman masyarakat dan budaya Indonesia bukanlah isu baru. Franz Magnis-Suseno (2010) mengklaim bahwa sejak negara ini berdiri sebagai negara otonom. Indonesia adalah negara dengan keberagaman budaya, etnis, dan agama yang sangat kaya. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai ideologi negara berperan krusial dalam memelihara kesatuan dan keragaman. Sejak diresmikan sebagai dasar negara pada tahun 1945, Pancasila telah diakui sebagai pedoman moral dan ideologis yang mendasari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dirumuskan untuk menjembatani perbedaan dan mempersatukan berbagai kelompok dalam satu kesatuan yang harmonis.

Namun, dalam era globalisasi dan dinamika sosial yang semakin kompleks, tantangan terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila semakin besar. Fenomena multikulturalisme, yang mengedepankan keberagaman budaya dan identitas kelompok, seringkali menghadapi potensi konflik dan pergeseran nilai-nilai. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai instrumen efektif dalam mendukung multikulturalisme dan menjaga kesatuan bangsa. Seperti yang dikatakan Franz Magnis-Suseno (2005), Indonesia hanya dapat bersatu jika keberagaman yang

merupakan realitas sosial dihormati. Meskipun demikian, menjaga persatuan Indonesia tidak seharusnya menghilangkan identitas masing-masing negara, tetapi tujuannya adalah agar setiap orang menjadi warga negara Indonesia tanpa mengalami keterasingan. Kemakmuran Indonesia di masa depan bergantung pada pola pikir yang menghargai identitas masing-masing dan siap menahan diri untuk tidak memaksakan keyakinan sendiri kepada orang lain. Hal ini menuntut transformasi pengetahuan multikulturalisme menjadi identitas nasional dan integrasi nasional, serta menjadikan agama sebagai landasan kohesi nasional (Shofa, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip multikulturalisme dalam konteks sosial dan pendidikan. Dengan memahami peran Pancasila dalam membangun harmoni antar kelompok yang berbeda, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan yang muncul serta memperkuat rasa persatuan dan identitas nasional yang inklusif.

Metode

Metode yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi penerapan Pancasila dalam konteks multikulturalisme. Metode yang diterapkan mencakup studi pustaka. Studi pustaka melibatkan pembacaan dan penelaahan berbagai buku serta publikasi ilmiah terkemuka yang relevan dengan bidang studi. Hal ini memungkinkan dilakukannya analisis untuk memperoleh pandangan atau opini penulis. Penulisan artikel ini melibatkan pembahasan tentang Pancasila, multikulturalisme, serta kesulitan dan dampak keberagaman di Indonesia. Tujuan penggunaan metode studi pustaka ini adalah untuk mengumpulkan informasi teoritis yang akan membantu penulisan artikel. Temuan dari tinjauan pustaka, menurut Faisal (1992:30), dapat digunakan untuk menjelaskan isu-isu yang akan diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Indonesia adalah negara yang kompleks dari berbagai dimensi, terutama dari segi keberagaman etnis atau suku bangsa. Bhineka Tunggal Ika erat kaitannya dengan Pancasila sebagai penyatu bangsa, disebut sebagai semboyan negara yang sangat dibanggakan, yang terkandung dalam simbol Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika menjadi motto bangsa Indonesia tertera pada Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang menerangkan di bawah lambang yang tercatat dengan huruf latin dalam bahasa Jawa, sebuah slogan yang bermakna: Bhinneka Tunggal Ika, kata Bhinneka merupakan perpaduan dari dua kata: Bhinna dan ika. Secara menyeluruh didefinisikan sebagai 'berbeda tapi tetap satu'.

Multikulturalisme di Indonesia memiliki karakteristik unik yang berkembang berdasarkan semangat nasionalisme. Multikulturalisme Indonesia mengakui keberagaman budaya dari berbagai suku bangsa sebagai bagian dari kehidupan berbangsa. Keberagaman ini tidak dimaksudkan untuk memisahkan, melainkan untuk memperkuat kesatuan. Oleh karena itu, budaya dari masing-masing suku bangsa harus dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Proses ini melalui komunikasi dan dialog menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.

Menurut Magnis Suseno (2005: 216), sebagai bangsa multikultural, Indonesia harus dilihat melalui perspektif multikulturalisme untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Negara ini dapat menjadi utuh jika keberagaman dihargai dan dihormati. Upaya menjaga persatuan tidak dimaksudkan untuk menghapus identitas setiap kelompok, melainkan untuk mengedepankan toleransi dan saling menghargai tanpa diskriminasi. Toleransi, saling menghormati, dan tidak memaksakan kehendak merupakan kunci tercapainya multikulturalisme yang ideal. Di era reformasi yang ditandai dengan keterbukaan politik, tantangan semakin kompleks, termasuk keberagaman dalam etnis, ras, agama,

gender, dan budaya. Tantangan ini dapat diatasi dengan mengembangkan multikulturalisme berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kymlicka (2004: 43) menekankan pentingnya multikulturalisme yang cair dalam kelompoknya, memberikan kebebasan berafiliasi, dan memiliki konsepsi identitas kelompok yang non-eksklusif.

Multikulturalisme di Indonesia seharusnya mengacu pada nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, yang mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan, harus menjadi dasar dalam menerima pluralitas selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Multikulturalisme dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, namun juga berpotensi menyebabkan perpecahan jika tidak dikelola dengan baik. Sifat egosentrisme yang mengatasnamakan agama atau suku dapat menimbulkan eksklusivisme dan konflik. Menjadikan multikulturalisme sebagai kekuatan Indonesia adalah tantangan yang memerlukan sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk menghindari dampak negatif. Misalnya, isu-isu seperti intoleransi, ketidakadilan sosial, dan polarisasi politik dapat mengancam persatuan. Penting untuk menilai bagaimana nilai-nilai Pancasila diadaptasi untuk menghadapi tantangan-tantangan ini dan bagaimana strategi dapat diperkuat untuk mempromosikan inklusi.

Pancasila dalam perspektif multikulturalisme dalam menjaga kesatuan dan keragaman. Pancasila, sebagai ideologi dasar negara Indonesia, memiliki lima sila yang masing-masing menyampaikan nilai-nilai fundamental: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini dirancang untuk mencerminkan dan mendukung kesatuan bangsa yang multikultural, menyediakan kerangka kerja untuk menghormati perbedaan sambil memperkuat persatuan.

Studi kasus dari daerah dengan tingkat keberagaman yang tinggi, seperti Papua atau Sulawesi Selatan, menunjukkan bagaimana Pancasila diterapkan dalam praktik lokal untuk memfasilitasi hubungan antar kelompok. Misalnya, inisiatif lokal yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila sering kali berhasil dalam mengurangi ketegangan sosial dan mempromosikan kerjasama lintas budaya. Contoh lain termasuk program pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum untuk membentuk sikap toleransi dan solidaritas di kalangan pelajar.

Untuk memperkuat penerapan Pancasila dalam konteks multikulturalisme, disarankan agar pemerintah dan masyarakat terus meningkatkan upaya untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dan multikulturalisme. Program program edukasi yang melibatkan pelatihan tentang toleransi, dialog antarbudaya, dan penyelesaian konflik harus diprioritaskan. Selain itu, kebijakan publik harus mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila dalam upaya mempromosikan keadilan sosial dan memfasilitasi integrasi sosial yang harmonis.

Simpulan

Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kesatuan dan keragaman di tengah masyarakat yang multikultural. Artikel ini membahas bagaimana Pancasila berfungsi sebagai landasan nilai-nilai yang mendukung persatuan bangsa dan toleransi antar kelompok etnis dan budaya. Dalam konteks multikulturalisme, Pancasila tidak hanya menjadi alat pemersatu tetapi juga sebagai pedoman dalam menyelesaikan konflik dan menciptakan harmoni sosial. Dengan menganalisis penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam berbagai kebijakan sosial dan pendidikan, serta studi kasus dari berbagai daerah di Indonesia, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan strategi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip multikulturalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya, Pancasila tetap efektif dalam memfasilitasi dialog antar budaya dan memperkuat identitas nasional yang inklusif. Jadi dapat disimpulkan, Pancasila tetap menjadi alat yang efektif dalam menjaga kesatuan dan keragaman di Indonesia, asalkan diimplementasikan secara konsisten dan adaptif

terhadap konteks sosial yang terus berubah. Memperkuat pendidikan tentang Pancasila dan prinsip-prinsip multikulturalisme serta menegakkan kebijakan yang mendukung inklusi sosial adalah kunci untuk memastikan keberhasilan penerapan ideologi ini dalam masyarakat yang semakin kompleks.

Referensi

- Faisal, Sanafiah. (1992). *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Gultom, A. F. (2010). Dialog Transformatif Agama Dan Kekerasan. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 4(2), 279-289.
- Gultom, A. F. (2011). *Guru Bukan Buruh*. Malang: Servaminora.
- Gultom, A. F. (2021). *Beriman di Masa Pandemi*. Medan: CV. Sinarta
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22(1), 23-34. <https://doi.org/10.19109/intizar.v22i1.542>
- Kymlica (2004). *Kewargaan Multikultural*. Jakarta:LP3ES.
- Luh Putu Swandewi Antari, L. D. (2020). *Implementasi Nilai Nilai Pancasila dalam Penguatan Karakter Bangsa*.
- Nurcholis, A. (2015). *Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara: Menjaga Keberagaman dalam Persatuan*. Jakarta: Pustaka Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
- Risladiba, R., & Sundawa, D. (2018, November). Implementation of Pancasila Values in Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Community to Make Good and Smart Citizens. In *Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)* (pp. 402-405). Atlantis Press.
- Shofa, A. M. I. A. (2016). Memaknai kembali multikulturalisme Indonesia dalam bingkai Pancasila. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 1(1), 34-40.
- Soekarno, B. (1965). *Pancasila: Dasar Negara Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Suseno, Franz Magnis. (2005). *Berebut Jiwa Bangsa*, Jakarta: Kompas.
- Toriyono, M. D., Sibilana, A. R., & Setyawan, B. W. (2022). Urgensi Pendidikan Multikultural Dalam Pengembangan Karakter Di Era Society 5.0 Pada Perguruan Tinggi. *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 12(2), 127-140.
- Wadu, L. B., Kasing, R. N. D., Gultom, A. F., & Mere, K. (2021, April). Child character building through the takaplager village children forum. In *2nd Annual Conference on Social Science and Humanities (ANCOSH 2020)* (pp. 31-35). Atlantis Press.